

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntansi

Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan/ pengikhtisaran, dan pelaporan yang disahkan dalam laporan keuangan yang berisi sumber-sumber informasi ekonomi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Lubis, 2017). Accounting is an information system that provides reports to stakeholders about that economic activities and condition of bussiness yakni akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyajikan laporan untuk stakeholder mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi bisnis (Reeve, 2012).

Teori akuntansi merupakan susunan konsep, definisi, dalil, yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi yang menjelaskan hubungan antara variabel dengan variabel lainnya dalam struktur akuntansi dengan maksud dapat menjelaskan dan meramalkan fenomena yang mungkin akan muncul (Harahap, 2012). Dari beberapa pengertian akuntansi dapat disimpulkan bahwa akuntansi terdiri dari tiga aktivitas yaitu :

1. Aktivitas identifikasi yaitu mengidentifikasi transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan.

2. Aktivitas pencatatan yaitu aktivitas yang dilakukan untuk melakukan pencatatan transaksi-transaksi yang telah diidentifikasi secara kronologis dan sistematis.
3. Aktivitas komunikasi merupakan aktivitas untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan atau pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal.

2.1.2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Kementerian Menekop dan UKM pengertian UKM (Usaha Kecil Menengah) adalah usaha yang mempunyai, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara UM (Usaha Menengah) adalah entitas usaha milik warga negara Indonesia yang mempunyai kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

UKM adalah entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d 99 orang (Muditomo, 2012). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,

UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997-1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh (BI, 2015).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah alat yang penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan (Raharjaputra, 2011). Menurut PSAK Nomor 1 Tahun 2015, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Hasil akhir dari proses akuntansi, yang terdiri dari dua laporan utama yaitu neraca dan perhitungan laba rugi dan berupa laporan yang sifatnya sebagai pelengkap

seperti laporan laba yang ditahan serta laporan sumber dan penggunaan dana atau laporan perubahan posisi keuangan (Harnanto, 2002).

Tujuan laporan keuangan menurut (IAI, 2009) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan.

2.1.4. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

SAK ETAP merupakan pilar kedua standar akuntansi keuangan di Indonesia setelah SAK umum berbasis IFRS. SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik sebagaimana telah dijelaskan pada ruang lingkup SAK ETAP, termasuk UMKM. SAK ETAP mengatur pencatatan akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK umum dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi pada laporan keuangan (IAI, 2009).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP Tahun 2009, laporan keuangan yang lengkap meliputi :

1. Neraca

Merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi

keuangan perusahaan pada akhir periode. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut :

- a. Kas dan setara kas
- b. Piutang usaha dan piutang lainnya
- c. Persediaan
- d. Properti investasi
- e. Aset tetap
- f. Aset tidak berwujud
- g. Utang usaha dan utang lainnya
- h. Aset dan kewajiban pajak
- i. Kewajiban diestimasi
- j. Ekuitas

2. Laporan laba rugi

Menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Beban keuangan
- c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas.

- d. Beban pajak
- e. Laba atau rugi neto

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (bergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut.

4. Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

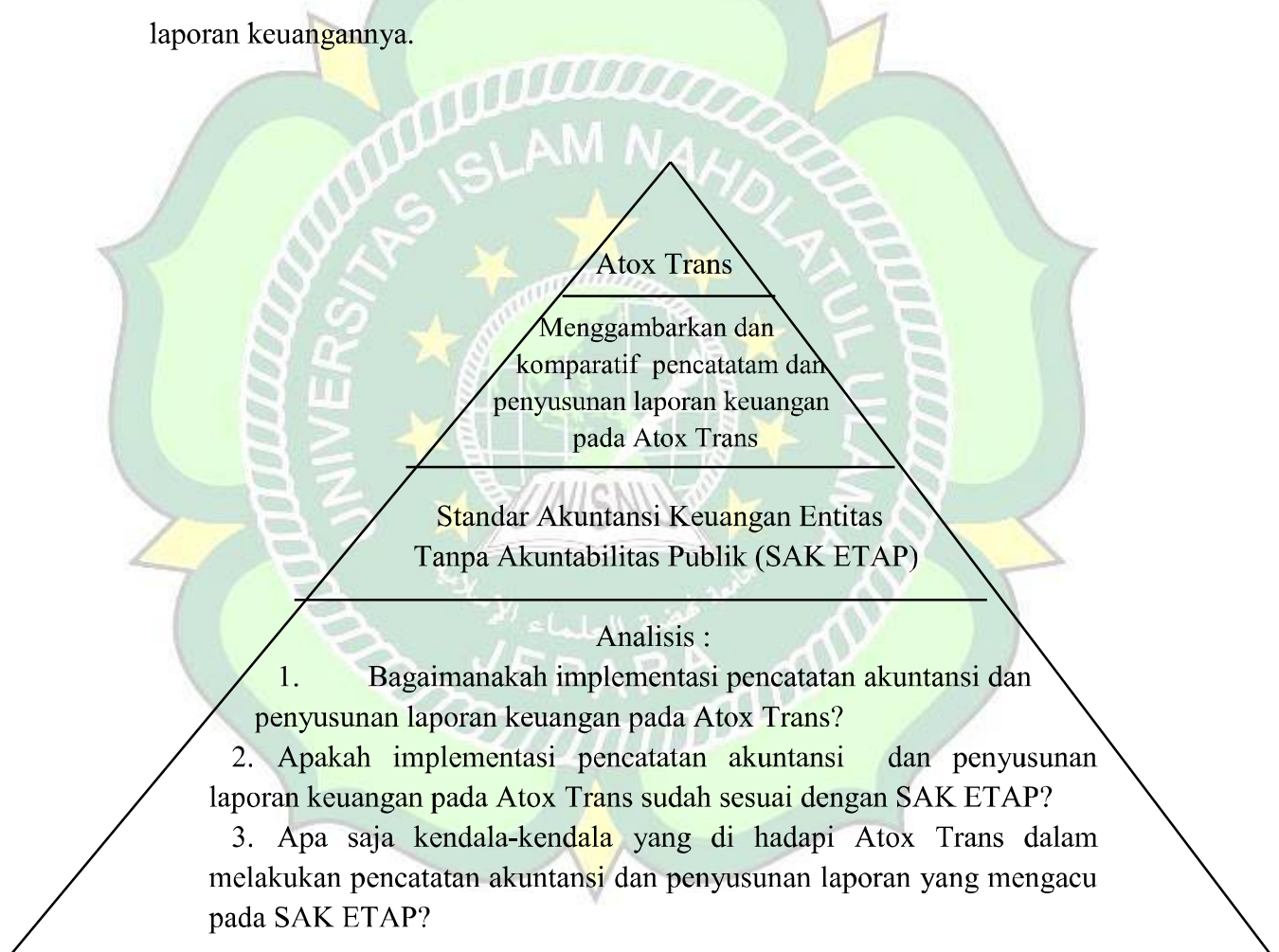
No	Penulis & Tahun	Judul	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Lilya Andriyani, 2014)	Analisis Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) (Sebuah Studi Intrepetatif Pada Peggy Salon).	Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan diskriptif.	Sistem pencatatan keuangan dilakukan secara manual dan masih sangat sederhana, dilakukannya pencatatan untuk mempermudah pemilik dalam memberikan bonus kepada karyawan. Yang menyebabkan gagalnya penerapan SAK ETAP pada peggy salon adanya kurangnya pemahaman, kedisiplinan, serta pengawasan stakeholder terhadap laporan keuangan.
2.	(Widyastuti, 2017).	Pencatatan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Jasa.	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Dis-Co belum menerapkan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK- ETAP pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana yaitu mencatatkan pendapatan dari hasil pembayaran uang jasa bimbingan belajar oleh siswa dan pengeluaran berupa beban dan biaya-biaya pada buku besar yang

				ditulis secara manual
3.	(Kurniawanysah, 2016)	Penerapan Pencatatan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada UMKM Desa Gembongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi	Penelitian Kualitatif menggunakan analisis triangulasi data.	Para pelaku UMKM desa Gembongsari meskipun sebagian besar telah mengerti melakukan pencatatan namun masih beberapa yang masih belum tepat, seperti salah menjurnal, tidak bisa menghitung harga pokok penjualan, dan tidak bisa menyusun laporan keuangan. Dari hasil wawancara, kuesioner, dan FGD diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang sering dihadapi oleh pengusaha UMKM desa Gembongsari yaitu di (1) Bidang SDM berkaitan dengan pendidikan, tingkat motivasi, penguasaan teknologi yang rendah. (2) Tidak bisa menghitung harga pokok produksi dan penjualan. (3) Pemasaran meliputi keterbatasan pasar, distribusi, maupun luas pasar yang dituju. (4) Keuangan berkaitan dengan keterbatasan modal, sulit mencari tambahan modal, dan juga keterbatasan dalam administrasi pembukuan atau keuangan.
4.	(Ezeagba, 2017)	Financial Reporting in Small Medium Enterprise (SMEs) in Nigeria	Survey and time series data research were used for the study.	The hypotheses tested revealed that there are challenges facing small medium enterprises (SMEs) in adapting effective accounting reporting in Nigeria. The

		Challenges and Option.		<p>study found out that the following are challenges facing SMEs in preparation and presentation of financial reports, unavailability, or inadequate accounting books and records, manpower, accounting system and not running their transaction through the banking system. The study further revealed that SMEs in Nigeria have not migrated to international financial reporting standard as required in the National Action Plan for implementation of IFRS in Nigeria.</p>
5.	(Ghofiin, 2018)	<p>Implementation of Financial Accounting Standards For Non-Publicly – Accountable Entities (SAK) ETAP On The Financial Report KPRI Karya Dwijatama Surabaya.</p>	<p>The type of research that is used is descriptive research, namely the type of research that tries to describe and interpret object according to the real situation. The approach in this study is a qualitative approach</p>	<p>In general the arrangement of financial report that is made is good and quite complete. But there are still standards that are required in SAK ETAP not all of them have been fulfilled.</p>

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penerapan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP pada UMKM di bidang jasa yaitu Atox Trans. Sehingga bisa diketahui apakah SAK ETAP bisa diterapkan pada laporan keuangan UMKM tersebut, dan menganalisis kendala yang dihadapi UMKM tersebut dalam menerapkan SAK ETAP pada laporan keuangannya.



Gambar 2.0.1 Kerangka Penelitian